

Menuju Pertumbuhan Berkesinambungan dan Inklusif: Tantangan di tengah Gejolak Global

Dr. Darmin Nasution

Gubernur Bank Indonesia

Pertemuan Tahunan Perbankan

23 November 2012

Yang saya hormati,

Para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,

Para Pimpinan Lembaga Negara,

Para Pimpinan Perbankan di Tanah Air,

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Assalamu`alaikum Wr. Wb,

Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua,

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Mengawali perbincangan kita malam ini, saya ingin mengajak seluruh hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala nikmat yang dilimpahkanNYA kepada kita semua maka kita dapat bertemu kembali dalam suasana yang sangat baik, di acara Pertemuan Tahunan Perbankan tahun 2012 ini.

Dalam kesempatan yang baik ini, atas nama seluruh anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, perkenankan saya menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat perbankan, Dewan Perwakilan Rakyat, jajaran Pemerintah, kalangan pengusaha, akademisi,

pengamat, media masa dan berbagai pihak lain, yang telah memberikan dukungan kepada pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

<Perekonomian Indonesia dalam Dinamika Global dan Domestik>

1. Pada acara "Pertemuan Tahunan Perbankan" yang diselenggarakan pada 9 Desember tahun 2011 lalu, di ruang ini pada saat itu saya menangkap nuansa optimisme menyelimuti kita semua. Kita optimis, tahun 2012 akan menjadi tahun yang membuka harapan dan kesempatan bagi kita untuk dapat terus mengawal perekonomian tumbuh lebih tinggi.
2. Harapan tersebut tidaklah berlebihan, karena perekonomian kita selama tahun 2011 lalu terus melaju dengan stabilitas yang tetap terpelihara. Sejak awal 2011 kita juga mulai melihat tanda-tanda kebangkitan ekonomi AS dari krisisnya yang cukup dalam di tahun 2008.
3. Namun, ketika sampai di pertengahan tahun 2012 lalu kita menyadari bahwa krisis global ternyata belum sampai di ujungnya. Luasnya dimensi permasalahan krisis yang membelenggu ekonomi Eropa ternyata menimbulkan dampak global yang luar biasa di tahun 2012 ini.
4. Hingga kini, kawasan Eropa dihadapkan pada jebakan utang, kontraksi fiskal, sempitnya ruang kebijakan moneter, melambungnya tingkat pengangguran, merapuhnya bangunan sektor keuangan, serta merosotnya kepercayaan pasar. Seluruhnya menyatu padu membentuk sebuah lingkaran negatif (*vicious circle*) dalam pusaran krisis, yang menyandera Eropa untuk dapat keluar dari belitan krisis yang berkepanjangan.
5. Dengan interkonektivitas global yang semakin menguat, tidak ada satu pun negara yang benar-benar terisolasi dari dampak krisis Eropa. Sejak

pertengahan 2012 kita menyaksikan perekonomian beberapa negara emerging market terutama China tampak mulai kehilangan tenaga.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati

6. Dalam dan luasnya krisis -sejak era pecahnya gelembung *sub-prime* di AS dan berlanjut dengan krisis utang Eropa- telah menggeser mundur sendi-sendi perekonomian negara maju. Pergeseran ini akan menyulitkan untuk memacu kembali potensi pertumbuhannya. Dalam dua atau tiga tahun ke depan, perekonomian negara maju harus menerima sebuah keseimbangan barunya, sebuah laju pertumbuhan yang cenderung stagnan.
7. Kalangan analis menyebut keseimbangan baru tersebut sebagai era '*the new normal*'. Sebuah era hasil koreksi terhadap penggelembungan ekonomi selama era emas '*the great moderation*' yang cukup panjang (2000-2007). Gelembung ekonomi yang semakin membesar tapi rapuh itu akhirnya pecah, terkoreksi melalui episode "*Lehman Shock*" di akhir 2008.

Hadirin sekalian

8. Bila negara maju mengawali dekade awal milenium baru ini dengan era emas '*the great moderation*' dan menutupnya dengan mendung '*the new normal*', sebaliknya yang terjadi dengan kita di Indonesia. Kita memasuki dekade awal milenium baru dengan masa-masa sulit program stabilisasi ekonomi paska krisis 1997/1998. Namun, kita mengakhirinya dengan masa-masa transisi sebuah perekonomian yang sudah berhasil masuk ke dalam kategori negara berpenghasilan menengah (*middle income country*).
9. Pendapatan per kapita Indonesia per akhir 2011 lalu sudah mencapai sekitar USD 3.000, meningkat enam kali lipat dari angkanya di masa krisis Asia 1997/1998. Jika ekonomi kita terus tumbuh dengan stabilitas yang

tetap terpelihara, bukan tidak mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi Indonesia akan menjadi negara berpenghasilan menengah atas (*upper middle income*) dengan pendapatan per kapita menembus USD 4.000.

10. Kita juga menutup dekade awal milenium baru dengan fenomena berkembangnya kelompok masyarakat yang sudah memasuki taraf kehidupan yang lebih wajar, yang kerap disebut kelompok kelas menengah. Saat ini dan ke depan kelompok baru ini merupakan kekuatan transisional yang akan memengaruhi segala sendi kehidupan kita, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.
11. Kita bisa berharap, dengan pesatnya peningkatan penduduk usia produktif -sebagai bonus demografi dalam piramida kependudukan-, maka berkembangnya kelas menengah akan terus terjadi setidaknya hingga 20 tahun ke depan.

Bapak/Ibu sekalian

<Pencapaian kinerja ekonomi domestik>

12. Di tengah kelesuan berkepanjangan di negara maju, berkembangnya kelompok kelas menengah telah memperkuat basis permintaan barang dan jasa di pasar domestik. Kekuatan ini secara persisten telah menopang ekspansi perekonomian, disertai munculnya sentra-sentra baru pertumbuhan di luar Jawa. Dalam delapan tahun terakhir, perekonomian dapat kita pertahankan terus tumbuh dengan rata-rata sekitar 6.1 - 6.2 % per tahun, salah satu yang tertinggi di dunia.
13. Selain ekspansi kelas menengah, daya tahan perekonomian juga didukung lingkungan makro dan sistem keuangan yang terjaga kondusif dan stabil. Kondisi ini memberikan ruang bagi ekspansi perekonomian yang semakin

meluas (*broad-based*). Dalam pandangan saya, pencapaian ini juga tidak terlepas dari kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan perbankan yang dibangun berlandaskan azas kehati-hatian dan kedisiplinan, serta terkoordinasi secara solid.

14. Sebuah pemaparan menarik disajikan oleh majalah **the Economist** yang terbit pada 10 November 2012 lalu. Ketika mengulas tentang era baru *Great Moderation* di Asia, media ini meng-aplaus Indonesia sebagai perekonomian dengan pertumbuhan ekonomi terstabil di dunia dalam 20 (dua puluh) triwulan terakhir.
15. Media ini juga mengakui Indonesia sebagai pelopor dalam penerapan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial. Melalui sebuah bauran kebijakan yang efektif, Indonesia dipandang mampu memitigasi risiko kredit dan mencegah pelarian modal, tanpa harus menaikkan suku bunga.
16. Kestabilan pertumbuhan ekonomi tersebut, menurut media ini juga tidak terlepas dari kebijakan bank sentralnya yang secara lebih dini (*pre-emptive action*) melonggarkan kebijakan moneter. Sejak Oktober 2011 lalu Bank Indonesia merupakan bank sentral pertama di kawasan Asia yang menurunkan suku bunga kebijakan.
17. Dalam pandangan saya, ulasan media ini memperlihatkan sebuah 'referensi segar' bahwa dalam pengelolaan kebijakan makro mengandalkan kehati-hatian dan kedisiplinan saja tidaklah cukup. Di akhir hari, **"policy is an art rather than science"**.

Bapak/Ibu sekalian

18. Meskipun pertumbuhan dapat dipertahankan pada tingkat yang tinggi, laju inflasi dalam beberapa tahun terakhir justru menunjukkan tren menurun.

Demikian pula, nilai tukar rupiah dalam tiga tahun terakhir memperlihatkan fluktuasi dalam batas yang wajar dan selaras dengan nilai fundamentalnya.

19. Tercapainya kestabilan inflasi dan nilai tukar, di satu sisi, telah menciptakan sebuah iklim yang kondusif bagi ketahanan industri perbankan. Di sisi lain, daya tahan industri perbankan kita yang semakin teruji, menjadi peredam guncangan (*shock absorber*) bagi perekonomian. Hemat saya, kemampuan daya redam ini ditopang baik oleh kekuatan modal yang cukup memadai dalam menyerap berbagai risiko, maupun karena efektifnya pengaturan dan pengawasan.
20. Dengan ketahanan yang semakin teruji, fungsi intermediasi perbankan pun berjalan pada jalurnya yang tepat (*on the right track*). Ini tercermin dari peningkatan yang cukup tinggi pada kredit produktif, disertai dengan tingkat kredit bermasalah yang rendah.
21. Dengan risiko makro yang menurun dan stabilitas sistem keuangan yang stabil, dinamika saving-investment pun menjadi lebih bergairah dan kontributif terhadap penguatan fondasi struktural perekonomian. Investor mulai merasakan kenyamanan dalam mengembangkan kapasitas produksi. Gambaran ini terlihat dari meningkatnya rasio investasi terhadap PDB, bahkan di tahun ini telah melampaui levelnya sebelum krisis 1997/1998.

Hadirin sekalian yang berbahagia

<Permasalahan/Tantangan saat ini>

22. Atas dasar beberapa catatan yang saya sampaikan tadi, tidaklah berlebihan kalau mengatakan bahwa di tengah situasi global yang penuh gejolak, cukup banyak keberhasilan yang kita raih di tahun 2012 ini. Tetapi, dibalik

semua catatan keberhasilan itu kita juga menyadari berbagai tantangan perlu terus kita benahi bersama.

23. Dalam pandangan saya, tantangan terbesar saat ini adalah 'bagaimana kita dapat mengalokasikan sumber daya ekonomi secara lebih efisien dan tepat sasaran', serta 'bagaimana kita dapat meningkatkan kapasitas inovasi dan kesiapan teknologi'.
24. Pada titik ini, saya meyakini kecepatan dalam menjawab kedua tantangan besar tersebut akan memengaruhi kemampuan kita, untuk dapat menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi secara 'berkeseimbangan'. Saya mendefinisikan keseimbangan tersebut sebagai 'keseimbangan internal' yaitu keseimbangan pertumbuhan dan inflasi, dan 'keseimbangan eksternal' yaitu keseimbangan neraca pembayaran.
25. Kalau dapat kita ibaratkan, 'keseimbangan internal' dan 'keseimbangan eksternal' ini sebagai dua bejana yang saling berhubungan. Keduanya atau salah satu saja tidak berimbang akan bisa menyebabkan ekonomi cepat kehilangan tenaga.
26. Perekonomian kita sempat menghadapi ketidakseimbangan eksternal di tahun 2005 dan 2008 lalu, karena permintaan domestik tidak ditopang alokasi sumber daya ekonomi secara efisien dan tepat sasaran. Saya ingin mengkaitkan hal ini dengan pentingnya kita me-rekomposisi belanja fiskal agar lebih tepat sasaran, terutama untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur.
27. Benar adanya, bahwa struktur belanja fiskal yang mengdepankan subsidi BBM dan belanja rutin menyumbang pada resiliensi permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi pun dapat dipertahankan stabil hampir merata di

seluruh wilayah. Namun, distorsi harga yang ditimbulkannya telah mendorong konsumsi BBM yang berlebihan. Sebaliknya, ketersediaan 'infrastruktur dasar' masih jauh dari memadai.

28. Sebuah *lesson learned* yang sangat berharga sudah kita peroleh dari krisis mini 2005. Bahwa keterlambatan dalam merespon akumulasi permasalahan berupa penundaan penyesuaian harga BBM, berakibat pada penerapan kebijakan yang eksekutif. Ujungnya, inflasi menjulang hingga 17% dan daya beli masyarakat merosot tajam.
29. Dari sisi Bank Indonesia, di tahun 2012 ini kami terus mengupayakan agar keseimbangan neraca pembayaran dapat terkelola dengan baik. Namun, menjaga keseimbangan neraca pembayaran bukanlah semata menyangkut persoalan kebijakan suku bunga, nilai tukar, atau makroprudensial.
30. Secara fundamental, dinamika neraca pembayaran lebih melekat pada persoalan bagaimana industri kita memiliki kemampuan bersaing, berdikari dalam mengembangkan kapasitas inovasi dan kesiapan teknologi, serta bagaimana sumber daya ekonomi dialokasikan secara efisien dan tepat sasaran.
31. Di tengah ekonomi yang terus ber-ekspansi, berbagai tantangan tersebut pada akhirnya bermuara pada kemampuan kita mengarahkan kegiatan ekonomi ke arah yang lebih produktif. Salah satunya adalah mengarahkan agar tidak timbul potensi kerawanan pada perekonomian seperti dari gelembung harga aset.
32. Pengamatan kami menunjukkan, sejak September 2011 lalu pertumbuhan kredit kepemilikan perumahan (KKP) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) tumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata pertumbuhan kredit secara

agregat. Potensi risiko penggelembungan harga asset ini apabila tidak segera dicegah dapat memicu ketidakstabilan makro dan sistem keuangan.

Bapak/Ibu sekalian

33. Selain tantangan makro tersebut, tantangan juga mengemuka terkait dengan upaya untuk mendorong sektor perbankan agar berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, melalui pembiayaan secara efektif dan efisien. Sesungguhnya, hal ini telah secara jelas diamanatkan dalam penjelasan UU Perbankan No.7 Tahun 1992, dan diubah dengan UU No.10 Tahun 1998.
34. Beberapa langkah awal untuk mendorong efisiensi perbankan telah kami rintis sejak tahun lalu. Kami menerbitkan kebijakan yang mewajibkan bank-bank mempublikasikan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).
35. Hasilnya sudah tampak pada penurunan suku bunga kredit secara bertahap, meskipun menurut hemat saya masih belum optimal. Lapisan masyarakat pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) misalnya masih harus menanggung beban suku bunga pinjaman kredit mikro sekitar 30%.
36. Dalam pandangan saya, agar optimal penguatan efisiensi harus dilakukan menyeluruh. Ini karena berbagai kendala mikro sangat memengaruhi efisiensi dan efektivitas bank dalam mengelola sumber dan penyaluran dana. Sebagai ilustrasi, sekitar 91 persen sumber pendanaan perbankan kita mengandalkan dana pihak ketiga (DPK), yang terkonsentrasi pada dana-dana jangka pendek.
37. Dari jumlah DPK tersebut, 44 persen dalam bentuk deposito berjangka, dimana sekitar 50 persen diluar skim penjaminan. Besarnya DPK di luar skim penjaminan dibentuk oleh struktur pasar dana yang tidak sehat karena

harga (suku bunga) terlalu banyak dipengaruhi oleh kekuatan oligopolistik sejumlah deposit besar.

38. Kendala mikro ini mengakibatkan suku bunga dana di sektor perbankan menjadi kurang lentur dalam merespon penurunan suku bunga kebijakan (*BI rate*).
39. Dari sisi pengelolaan dana, hanya sekitar 4,0 persen dari portofolio aset bank ditempatkan di pasar uang antar bank (PUAB). Dengan jumlah bank saat ini yang mencapai 120, kecilnya penempatan dana di pasar antar bank memperlihatkan struktur bangunan industri perbankan kita yang sangat tersegmentasi.
40. Kami mengamati, akses likuiditas hanya terkonsentrasi pada sekelompok kecil bank, sementara sebagian besar lainnya harus berkompetisi secara tidak sehat, yang berujung pada tingginya suku bunga dana.

Hadirin sekalian

41. Segmentasi dalam industri perbankan kita juga terlihat dari segi kapasitasnya. Masih banyak bank yang kegiatan operasionalnya tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, bahkan beroperasi di bawah skala ekonomis, sehingga tidak efisien.
42. Berdasarkan kajian Bank Indonesia, untuk bisa mulai beroperasi dalam skala ekonomis, suatu bank setidaknya harus memiliki modal inti Rp1 triliun. Kebutuhan modal inti ini akan meningkat menjadi minimum Rp5 triliun agar bank berada dalam kondisi skala ekonomis yang optimal.
43. Tidak mengherankan, jika kemudian tingkat efisiensi perbankan kita secara umum belum memuaskan. Saya menyambut baik penurunan rasio efisiensi yang dicerminkan pada BOPO secara industri hingga mencapai 74,26%

pada September 2012. Namun, masih banyak bank yang rasio efisiensinya masih di atas 90% bahkan beberapa bank di atas 100%.

Bapak/Ibu sekalian yang berbahagia

<Respon Kebijakan 2012>

44. Berbagai permasalahan serta tantangan dalam perekonomian yang saya uraikan tadi, dalam berbagai aspeknya terkait dengan inisiatif-inisiatif kebijakan strategis yang diambil Bank Indonesia selama tahun 2012 ini.
45. Dari sisi kebijakan moneter, perumusan kebijakan tetap ditempuh dengan melakukan kalibrasi bauran kebijakan suku bunga, nilai tukar, dan makroprudensial. Namun di tahun 2012 ini, kami perlu mengedepankan keluwesan, karena harus menjawab sekaligus dua tantangan global dan domestik, dengan dinamika dan ketidakpastian yang semakin meningkat terutama pada semester pertama 2012.
46. Dalam kurun waktu tersebut, kebijakan moneter perlu diarahkan agar berperan kontra-siklikal dalam mencegah dampak perlambatan ekonomi global. Oleh karena itu, di tengah terjaganya kestabilan harga-harga, pada 9 Februari 2012 kami memiliki ruang untuk menurunkan BI *rate* 25 basis point menjadi 5.75 persen.
47. Namun selanjutnya, stabilitas makro dan sistem keuangan menghadapi tantangan dengan menguatnya ekspektasi inflasi sejak Maret 2012, ditengah 'ketidakpastian' keputusan peyesuaian harga BBM. Belum sampai ekspektasi inflasi mereda, pasar keuangan global memasuki episod *risk-off* di sekitar April sampai Juni 2012, sehubungan dengan eskalasi krisis Eropa.
48. Oleh karena itu, sejak Maret 2012 kami mempertahankan BI *rate* di level 5.75%. Namun kami tetap dapat melakukan manuver kebijakan melalui

beberapa kali penyesuaian 'koridor' suku bunga *overnight*. Kerangka operasi moneter dalam rangka pengendalian likuiditas juga diperkuat dengan optimalisasi transaksi *Reverse-Repo-SBN* (RR-SBN).

Hadirin sekalian

49. Meningkatnya tantangan dalam perumusan kebijakan moneter sejak awal tahun 2012, juga diwarnai tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Dalam situasi pasar keuangan global yang sangat rentan, kami memandang kestabilan nilai tukar harus dijaga, karena akan menjadi 'garis pertahanan pertama' dalam memelihara kestabilan makro dan sistem keuangan secara keseluruhan.
50. Oleh karena itu, kami melakukan intervensi secara terukur, agar pasokan dan kebutuhan devisa di pasar tetap berimbang. Untuk memperkuat struktur pasokan devisa, sejak Juni 2012 Bank Indonesia secara reguler melakukan lelang *Term Deposit* (TD) Valas.
51. Dengan dibukanya lelang TD valas ini diharapkan dapat mengisi kelangkaan instrumen valas di domestik, termasuk untuk mengoptimalkan valas yang bersumber dari devisa hasil ekspor (DHE).
52. Untuk penguatan struktur pasokan devisa yang bersumber dari DHE, termasuk DHE migas, kami juga menerbitkan ketentuan tentang 'Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (**Trust**)'. Kebijakan ini, yang efektif berlaku hari ini, memiliki tujuan untuk memberikan landasan hukum kegiatan *Trust* oleh perbankan domestik dalam mengelola devisa atau harta yang dititipkan.
53. Sementara BI *rate* sejak Maret 2012 dipertahankan tetap di 5.75 persen, dalam pengelolaan permintaan domestik kami memprioritaskan pada

penerapan instrument makroprudensial, yaitu *Loan to Value Ratio* (LTV) dan *down payment*, yang diterbitkan pada Maret 2012 lalu.

54. Secara umum saya dapat mengatakan bahwa kalibrasi kebijakan moneter, nilai tukar, dan makroprudensial telah mulai terasa dampaknya pada perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi kita, walaupun melambat karena faktor global, tetap cukup tinggi karena ditopang oleh permintaan domestik yang terjaga. Sementara itu, inflasi tetap terkendali pada level yang rendah.

Hadirin sekalian yang saya hormati

55. Beranjak dari berbagai permasalahan yang melingkupi sistem keuangan dan perbankan seperti yang telah saya singgung di depan, pada tahun 2012 ini Bank Indonesia memformulasikan kebijakan perbankan dalam 3 (tiga) koridor, yang saling terkait. Ketiga koridor tersebut adalah (i) pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, dan (iii) penguatan fungsi intermediasi.
56. Respons kebijakan pada **koridor pertama**, yaitu pemeliharaan stabilitas sistem keuangan diimplementasikan dengan menerbitkan ketentuan makroprudensial. Ketentuan ini, bersama dengan kebijakan suku bunga dan nilai tukar, merupakan bagian dari bauran kebijakan seperti yang sudah saya singgung di depan.
57. Ketentuan makroprudensial dalam bentuk *'Loan to Value* (LTV) dan *down payment'* ditujukan untuk memitigasi potensi risiko pada sistem keuangan, sebagai akibat pertumbuhan kredit yang terlalu cepat pada sektor-sektor konsumtif. Untuk menghindari *'regulatory arbitrage'*, kami dalam waktu

dekat akan memberlakukan ketentuan LTV untuk bank syariah dan unit usaha syariah.

58. Untuk mengantisipasi dampak permasalahan perekonomian global, yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan, melalui perhitungan risiko-risiko yang lebih komprehensif pada modal bank, Bank Indonesia dalam waktu dekat akan melakukan penyempurnaan ketentuan "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum" (KPMM).
59. Bank akan diwajibkan menyediakan modal minimum sesuai profil risiko dengan kisaran antara 8% s.d. 14%. Jumlah ini dapat ditetapkan lebih besar, jika berdasarkan penilaian Bank Indonesia modal minimum yang ada belum cukup untuk mengantisipasi risiko yang dihadapi.
60. Demikian pula, untuk kantor cabang bank asing (KCBA) yang beroperasi di Indonesia, akan diwajibkan memelihara '*Capital Equivalency Maintained Assets*' (CEMA) minimum. CEMA ini adalah alokasi modal berupa dana usaha yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah tertentu dan yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan adanya CEMA, risiko-risiko yang dihadapi oleh KCBA di Indonesia, dapat segera diantisipasi dan dapat dimitigasi dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan domestik.
61. Dalam kerangka pemeliharaan stabilitas sistem keuangan ini pula, Bank Indonesia telah mengembangkan protokol manajemen krisis nilai tukar dan perbankan, serta menyempurnakan fasilitas pendanaan jangka pendek.
62. Protokol manajemen krisis BI ini telah terintegrasi dengan protokol manajemen krisis tingkat nasional, dibawah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK. Namun pada hakikatnya FKSSK ini masih

perlu dipayungi oleh UU JPSK, agar memadai dalam menanggulangi krisis keuangan yang sistemik.

Bapak/Ibu sekalian

63. Selanjutnya dalam **koridor kedua**, yaitu penguatan ketahanan dan daya saing perbankan ditempuh Bank Indonesia melalui: (i) penataan struktur kepemilikan bank, dan (ii) pengaturan penyesuaian kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank berdasarkan modal.
64. Penataan struktur kepemilikan bank, yang kebijakannya telah diterbitkan pada Juli 2012 lalu, memiliki filosofi dan semangat untuk meningkatkan tata kelola dan kesehatan bank. Bank-bank yang tata kelola dan tingkat kesehatannya dinilai baik (peringkat 1 dan 2) diberikan pengecualian, sepanjang peringkat yang baik tersebut dapat terus dipertahankan.
65. Sementara itu, pengaturan penyesuaian kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank, sangat diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing perbankan. Dalam waktu dekat, Bank Indonesia akan menerbitkan kebijakan 'Pengaturan Kegiatan Usaha dan Perluasan Jaringan Kantor Bank Berdasarkan Modal'.
66. Berdasarkan ketentuan ini, terdapat empat kelompok usaha bank umum, yang didasarkan pada besaran modal inti. Dalam masing-masing kelompok usaha tersebut, terdapat 'kegiatan usaha' yang dapat dilakukan oleh bank, sesuai jumlah modal inti yang dimilikinya.
67. Perbankan juga perlu didorong berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, di wilayah yang selama ini kurang terlayani (inklusif). Oleh karena itu, pengaturan kegiatan usaha bank ini dikombinasikan dengan pengaturan kembali 'mekanisme pembukaan jaringan kantor bank'.

68. Caranya adalah dengan menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif, melalui penggunaan alokasi modal inti dan zonasi wilayah, selain tentunya persyaratan tingkat kesehatan. Bagi bank-bank yang telah menunjukkan keberpihakannya kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ada perlakuan khusus (insentif) dalam persyaratan pembukaan jaringan kantor bank.
69. Kebijakan untuk menyesuaikan kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor dengan modal bank, juga dilengkapi dengan penyempurnaan tentang kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia (*Single Presence Policy*).
70. Penyempurnaan dilakukan dengan membuka kembali opsi pembentukan perusahaan induk (*holding company*). Dengan opsi ini maka *strategic investor* yang sudah menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank, dapat menjadi pemegang saham pengendali pada bank lain, tanpa adanya kewajiban melakukan merger atau konsolidasi diantara bank-bank yang dimilikinya.
71. Dalam **koridor ketiga**, kami ingin memastikan fungsi intermediasi berada pada jalur yang benar. Oleh karena itu, pada masing-masing kelompok usaha bank, ditetapkan 'target kredit produktif' yang harus dipenuhi setiap bank. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif maka dalam target tersebut juga termasuk 'kredit UMKM' sebesar minimum 20%, yang pengaturannya akan kami terbitkan dalam waktu dekat.

Hadirin sekalian yang berbahagia

72. Keberlangsungan ekspansi perekonomian dengan stabilitas sistem keuangan yang terjaga, perlu ditopang oleh 'sistem pembayaran' yang

handal, aman, dan efisien. Selama tahun 2012, Bank Indonesia berkolaborasi dengan pelaku industri sistem pembayaran melakukan berbagai upaya pengembangan.

73. Beberapa langkah penting selama tahun 2012 termasuk, (i) penyusunan standar dan penggunaan *chip* untuk kartu ATM/Debit, (ii) mendorong kerjasama jaringan ATM antara Bank, serta (iii) pengembangan Sistem Transfer Kredit Elektronik (STKE) bagi nasabah BPR melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
74. Selain itu, dalam rangka memitigasi risiko penyelenggaraan kartu kredit, pada awal 2012, Bank Indonesia menerbitkan peraturan mengenai pembatasan kepemilikan kartu kredit berdasarkan jumlah penerbit kartu kredit, per nasabah, sesuai dengan kemampuan keuangan nasabahnya.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

< Tantangan ke depan >

75. Sebelum kita membahas lebih fokus pada arah kebijakan Bank Indonesia ke depan, perkenankan saya mengajak kita semua untuk melihat bagaimana berbagai tantangan ke depan dalam perspektif yang lebih luas.
76. Menginjak tahun 2013 nanti, sebagaimana saya sampaikan di depan bahwa ekonomi negara maju akan memasuki era *the new normal*. Dalam era ini, kita perlu mewaspadaikan dua risiko besar, yang apabila tidak mampu dimitigasi, dapat menambah kompleksitas dalam pengelolaan kebijakan makro kita.

77. Pertama, risiko yang masih dapat mengemuka dari penanganan krisis Eropa. Kedua risiko jurang fiskal (*fiscal cliff*) di Amerika Serikat apabila tidak dicapai kompromi politik, atas pencegahan terhadap peningkatan pajak dan pemangkasan belanja anggaran.
78. Dalam publikasinya edisi Oktober 2012, IMF mengingatkan, bahwa kegagalan mengatasi kombinasi dua risiko global ini, akan menyeret kembali negara maju ke dalam pusaran resesi. Ekonomi global pun hanya akan tumbuh 2,0%, dibandingkan skenario *baseline* 3,6%.
79. Dengan potret risiko global ke depan seperti itu, tidak sulit untuk melihat demikian besarnya tantangan yang akan kita hadapi. Oleh karenanya, kita perlu memantapkan basis-basis pertumbuhan domestik. Dan, dengan modal dasar 'struktur demografi' yang mendukung, kita ditantang untuk segera melakukan berbagai penyesuaian struktural.
80. Kita dituntut untuk segera meng-efisienkan keseluruhan sendi-sendi perekonomian agar lebih berdaya saing. Pembangunan konektivitas domestik yang lebih efisien dan handal, perbaikan kemudahan berbisnis, harmonisasi regulasi, dan reformasi birokrasi merupakan sebagian dari simpul-simpul penting yang perlu kita terus benahi.
81. Saya khawatir, apabila kita terus menunda-nunda dalam melangkah, kita akan tetap terjebak dalam zona kenyamanan, dengan model ekonomi yang dimanjakan oleh sumber daya alam. Kita masih memiliki ruang waktu, karena sejak tahun 2020 dan selanjutnya, bonus demografi yang sekarang menopang ekonomi kita perlahan-lahan akan memudar.
82. Tetapi apabila kita berhasil, saya meyakini kita akan dapat membawa perekonomian kita, dari yang berbasis sumber daya alam (*resource driven*

growth), menuju ke perekonomian berbasis efisiensi (*efficiency driven growth*).

83. Namun, hanya mengandalkan efisiensi saja tidak akan cukup. Ini karena ke depan ekonomi kita akan berada dalam kawasan yang bertransformasi menjadi pionir pertumbuhan global. Dalam era tersebut, Asia akan menjadi basis konsumsi, produksi, dan kemajuan teknologi.
84. Kemampuan Asia sebagai basis produksi teknologi saat ini pun semakin diperhitungkan. Sebagai contoh, telepon genggam "i-Phone" berlabel produksi AS, hampir seluruh komponen didalamnya dipasok dari negara-negara Asia.

Hadirin sekalian

85. Posisi Asia ke depan sebagai 'the new growth frontier', akan ditopang oleh meningkatnya intensitas perdagangan intra-regional Asia-Pasifik. Pada era itulah kita akan berhadapan dengan tantangan sekaligus peluang.
86. Pertanyaan bagi kita semua saat ini adalah: "apakah kita mampu memanfaatkan potensi besar Asia ke depan dengan menjadi bagian dari 'mata rantai produksi kawasan'? Atau, kita akan tetap sebagai eksportir komoditi berbasis sumber daya alam dan menjadi pasar bagi negara Asia lain?".
87. Untuk masuk ke dalam bagian mata rantai produksi di kawasan Asia sebagai pelaku yang diperhitungkan, perekonomian kita mau tidak mau harus menjadikan 'inovasi' sebagai motornya (*innovation driven*). Saya meyakini, apabila kita berhasil masuk ke model ekonomi berbasis inovasi, akan terlahir banyak para wirausahawan yang handal, yang dapat berkompetisi dalam kancah persaingan global ke depan.

88. Untuk itu, penguatan infrastruktur sains dan teknologi, serta pembangunan human capital, untuk mendukung kesiapan teknologi dan peningkatan kapasitas inovasi di sektor swasta, adalah simpul-simpul strategis yang secara simultan perlu menjadi perhatian kita semua.

Bapak/Ibu sekalian

89. Dalam upaya kita membangun perekonomian yang efisien, inovatif, dan tumbuh berkesinambungan, kita tidak dapat melupakan pemerataan akses pada kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat (*inclusive*). Ada alasan ekonomi yang obyektif rasional, bahwa **'Strong growth is not necessarily inclusive. But, inclusive growth is a more sustained and optimal growth.**
90. Persoalannya, transisi sebagian dari masyarakat kita menjadi golongan masyarakat kelas menengah, berpotensi menimbulkan dampak transisional pada kesenjangan ekonomi. Ceteris paribus, perekonomian yang seperti itu dapat menjadi lebih rentan terhadap gejolak baik eksternal maupun internal.
91. Kerentanan tersebut dapat mengganggu keseluruhan kemampuan kita untuk mempertahankan stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan, sehingga diujungnya dapat mengganggu upaya kita mengentaskan kemiskinan dan pemeratakan pendapatan.
92. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif (*inclusive growth*) bukanlah sekedar jargon kosong. Fakta menunjukkan, bahwa Indonesia dengan jumlah penduduknya yang demikian besar, lebih dari setengahnya ternyata belum terjamah akses keuangan formal (Survey Bank Dunia tahun 2010).

93. Fakta ini juga memperlihatkan bahwa, pasar masih sangat terbuka lebar bagi industri perbankan. Oleh karena itu, dalam konteks pertumbuhan inklusif inilah Bank Indonesia melihat pentingnya upaya-upaya di bidang perbankan untuk mempercepat 'program keuangan inklusif'.

Hadirin sekalian

<Arah Kebijakan ke depan>

94. Dengan alur berpikir seperti itu, dalam pandangan saya, arah besar kebijakan ekonomi kita ke depan adalah untuk menjawab tantangan 'bagaimana menjaga agar perekonomian Indonesia tetap dapat tumbuh berkesinambungan'.

95. Namun, apabila kita mampu menjawab beberapa kendala struktural (*binding structural constraints*) seperti yang saya kemukakan di depan, kita dapat berharap perekonomian akan mampu tumbuh pada lintasan yang lebih tinggi, sekaligus dapat dipetik manfaatnya secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat.

96. Dengan mempertimbangkan bahwa, pengelolaan ekonomi makro ke depan masih akan berhadapan dengan risiko global, dan kompleksitas permasalahan domestik yang begitu besar, Bank Indonesia akan terus melakukan kalibrasi 'bauran kebijakan' yang terdiri dari instrumen suku bunga, nilai tukar, dan makroprudensial.

97. Untuk menjaga stabilitas makro dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia juga akan tetap memelihara kestabilan nilai tukar, sehingga memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi. Namun, dalam pandangan saya, bentuk stabilitas tersebut seharusnya memberikan ruang bagi proses pendalaman pasar keuangan.

98. Sektor keuangan yang dalam akan sangat membantu baik dalam meng-efektifkan transmisi kebijakan moneter, menyediakan lebih banyak keragaman instrumen investasi, dan memfasilitasi pembiayaan ekonomi secara efektif dan efisien, terutama oleh 'industri perbankan nasional'.

Hadirin sekalian

99. Saya memandang 'industri perbankan nasional' perlu terus didorong untuk memperkuat ketahanan, efisiensi, dan peranannya dalam intermediasi. Termasuk dalam penguatan intermediasi ini, adalah 'perluasan akses' masyarakat ke layanan jasa perbankan, dengan 'biaya yang lebih terjangkau' melalui 'program keuangan inklusif'.

100. Ke depan, 'program keuangan inklusif' harus dilakukan sekaligus dari dua sisi, yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi penawaran, perluasan akses layanan perbankan dengan biaya yang terjangkau, serta penyediaan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, mutlak dilakukan.

101. Terkait hal tersebut, ke depan kami akan memperluas akses layanan perbankan dengan cara non-konvensional, melalui pemanfaatan teknologi informasi, telekomunikasi, dan kerjasama keagenan, atau dikenal sebagai '*branchless banking*'. Melalui strategi ini, layanan perbankan dapat menjangkau segala lapisan masyarakat, tanpa perlu menghadirkan fisik kantor bank.

102. Namun demikian, *branchless banking* harus dilakukan secara terukur, dengan memperhatikan potensi risiko-risiko yang mungkin timbul, termasuk dampaknya pada stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, pada awal

2013 nanti, Bank Indonesia akan menerbitkan panduan (*guidelines*) pelaksanaan *branchless banking*.

Bapak/Ibu sekalian

103. Bank Indonesia juga memandang perlu mengoptimalkan kekekuatan masyarakat kelas menengah, melalui upaya percepatan lahirnya wirausaha-wirausaha baru. Untuk itu, melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak swasta, Bank Indonesia akan merancang program pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa-mahasiswa, eks Tenaga Kerja Indonesia (TKI), serta masyarakat umum.
104. Saat ini juga tengah dirancang skim kredit bagi wirausaha pemula (*start-up credit*). Skim kredit ini akan melibatkan instansi teknis dan pihak lainnya dalam kerangka pembinaan, pendampingan, dan penjaminan serta proses eligibilitas agunan kredit, seperti program sertifikasi tanah.
105. Sementara itu, untuk mengurangi hambatan terkait tingginya suku bunga pada segmen kredit mikro, kami akan mendorong kompetisi yang sehat pada segmen mikro ini, antara lain melalui publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Mikro (SBDKM).

Hadirin sekalian yang berbahagia

106. Selain mendukung percepatan program keuangan inklusif, arah kebijakan sistem pembayaran ke depan akan difokuskan pada tiga dimensi yang sangat strategis.
107. **Pertama**, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan instrumen sistem pembayaran, kami akan terus meningkatkan keamanan fitur-fitur penggunaan instrumen pembayaran

non tunai dan mendorong agar biaya transaksi non-tunai lebih terjangkau, aman, cepat, dan diterima secara luas .

108. **Kedua**, untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan pengguna jasa sistem pembayaran, kami akan mendorong terciptanya interoperabilitas di antara penyelenggara sistem pembayaran.
109. **Ketiga**, akan memperkuat kerangka hukum pelaksanaan sistem pembayaran untuk memberikan kepastian hukum, baik kepada penyelenggara maupun pengguna sistem pembayaran. Pesatnya perkembangan sistem pembayaran, yang didorong oleh kemajuan teknologi dan informasi, perlu didukung oleh penguatan landasan hukum dalam bentuk Undang-undang Sistem Pembayaran.

Bapak/Ibu sekalian

<Prospek Ekonomi>

110. Menutup pemaparan saya malam ini, izinkanlah saya menyampaikan prospek perekonomian kita untuk tahun 2013. Luas dan dalamnya tantangan global yang kita hadapi ke depan, tidak berarti bahwa prospek perekonomian kita tanpa optimisme.
111. Kita patut untuk tetap optimis, karena kita memiliki modal dasar yaitu perekonomian yang telah teruji stabil, permintaan domestik dengan basis kelas menengah yang tengah tumbuh, serta ketersediaan '*policy space*' yang cukup memadai untuk meredam risiko global.
112. Ketiga basis kekuatan ekonomi kita tersebut, akan tetap menumbuhkan keyakinan pelaku ekonomi, sehingga dapat menjadi daya dorong bagi berlanjutnya proses akumulasi modal.

113. Dengan prognosa demikian, dan juga dukungan belanja modal Pemerintah yang meningkat, kami memperkirakan laju pertumbuhan investasi masih akan meningkat ke 11,6% - 12,0% pada tahun 2013.
114. Dengan investasi yang meningkat, pada gilirannya akan mampu menjaga kekuatan daya beli masyarakat, sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2013, dapat dipertahankan pada tingkat 5,0% – 5,4%.
115. Ekspansi ekonomi juga memperoleh daya dorong dari kinerja ekspor yang diperkirakan mengalami perbaikan, sejalan membaiknya prospek harga komoditas. Untuk tahun 2013, ekspor diperkirakan tumbuh meningkat sebesar 5,4% - 5,8%.
116. Dengan basis-basis pertumbuhan domestik dapat semakin dimantapkan, kami meyakini penguatan momentum ekonomi nasional masih dapat kita pertahankan. Oleh karena itu, kami optimis perekonomian nasional di tahun 2013 akan tumbuh 6,3% - 6,7%.
117. Saya meyakini, pencapaian pertumbuhan akan menuju ke batas perkiraan tersebut yaitu 6,7%, apabila simpul-simpul kendala struktural yang saya sampaikan di depan dapat kita atasi.
118. Meski pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap tinggi, kami memperkirakan tekanan inflasi pada 2013 tetap akan terkendali dalam kisaran sasaran yang ditetapkan yaitu $4,5 \pm 1$ persen.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

<Penutup>

119. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Melihat pada tantangan yang akan kita hadapi, kita semua menyadari bahwa tahun-

tahun ke depan tidaklah lebih mudah dari tahun-tahun yang telah berlalu. Namun, kita tak boleh kehilangan harapan untuk bersikap optimis. Potensi kemampuan dan sumber daya kita sebagai bangsa masih begitu besar.

120. Kita yakin bahwa Tuhan senantiasa bersama kita untuk meridhoi dan meringankan langkah kita menuju masa depan yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Dr. Darmin Nasution